



**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
(RENJA PERUBAHAN)  
KECAMATAN CILONGOK  
TAHUN 2022**



**KECAMATAN CILONGOK**  
Jalan Raya Pernasidi No 7 Cilongok  
Telp/Fax 0281 655288 email [cilongok@banyumaskab.go.id](mailto:cilongok@banyumaskab.go.id)  
website [cilongokkec.banyumaskab.go.id](http://cilongokkec.banyumaskab.go.id)

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Cilongok Tahun 2022, Renja Perubahan ini sebagai penjabaran dari aktivitas kegiatan selama atau tahun dan merupakan amanat dari Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. RPJPD;
2. RPJMD;
3. Renstra SKPD;
4. RKPD; dan
5. RENJA SKPD

Rencana Kerja Perubahan ini memuat beberapa hal terkait dengan rencana yang akan dilakukan pada tahun 2022 diantaranya adalah :

- a. Program dan kegiatan;
- b. Lokasi kegiatan;
- c. Indikator kinerja;
- d. Kelompok sasaran; dan
- e. Pagu indikatif dan prakiraan maju

Semoga dengan adanya dokumen Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penyusunan kegiatan di Kecamatan Cilongok, sehingga dapat menghasilkan output outcome sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Cilongok, Agustus 2022  
Kecamatan CILONGOK  
  
RONI HIDAYAT, S.STP.M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19760908 199602 1 003

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I    PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah	7
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB IV    PENUTUP	29

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2022, sehingga telah dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2022. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional (RPJMN Tahun 2019-2024) sehingga kemudian telah dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan dijabarkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan antara lain dengan ditetapkannya Perpres 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2019-2024, dan ditetapkannya Perda nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sehingga telah ditetapkan pula perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, serta adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2019, yang memaksa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan perencanaan.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, maka setiap perangkat daerah wajib menindaklanjuti berbagai perubahan yang terjadi dan menuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Renja Perubahan merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
  16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
  28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;



29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah:

Menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Mensinergikan rencana program dan kegiatan prioritas dengan perubahan arah kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2022.

### **I.4. SISTEMATIKA**

**BAB I PENDAHULUAN;**

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022;**

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;**

**BAB V PENUTUP.**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan pencapaian target tahun 2022 Triwulan III dan IV. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2022, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan II atau semester I Tahun Anggaran 2022.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah**

Analisis capaian kinerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan II tahun berkenaan menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Permasalahan	Keterangan
								1	2						
															Perubahan dan Pra RKA 2023TW 4 : RKA 2023
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		TW II Presentase 100 % : seluruh gaji, tunjangan dan honor telah dibayar sesuai dengan jumlah pegawai yang ada ( 17 orang) TW III Presentase 100 % : seluruh gaji, tunjangan dan honor telah dibayar sesuai dengan jumlah pegawai yang ada ( 16 orang) TW IV Presentase 100 % : seluruh gaji, tunjangan dan honor telah dibayar sesuai dengan jumlah pegawai yang ada ( 15 orang) ( pensiun di Bulan Desember 1 orang )
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Presentase 100 % : seluruh barang milik perangkat daerah sudah memadai dan memenuhi kebutuhan ( Kendaraan dinas ( Mobil dan Sepeda Motor), laptop, printer, alat scan, meja dan kursi kerja, meja dan kursi tamu, meja dan kursi rapat, almari arsip, filling kabinet, AC, kipas angin, LCD dan layar proyektor, sound system, TV, CCTV, Mesin antri, Mesin Potong Rumput, gerobak sampah)
[KEGIATAN]X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.669.000	2.669.000	2.669.000			0				
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	10	4	3	3	3	3	1	1	2	66.67	6	60	TW II: Dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja yang disusun : DPA pergeseran TW III: Dokumen Perencanaan yang disusun adalah DPA Perubahan dan Pra RKA 2023 TW IV : Dokumen Perencanaan yang disusun adalah RKA 2023
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.309.000	1.309.000	1.309.000			0				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	10	4	3	3	3	3	1	1	2	66.67	6	60	TW III: Dokumen Perencanaan yang disusun adalah DPA Perubahan dan Pra RKA 2023 TW IV : RKA 2023
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.360.000	1.360.000	1.360.000			0				
[INDSUBKEGIATAN]	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Keg	12	4	4	4	4	4	1	1	2	50	6	50	Rapat yang dilaksanakan adalah Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan pada tanggal 25 Oktober 2022

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021			Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Permasalahan	Keterangan
				1	2	3	1	2	3								
[KEGIATAN]X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.112.571.495	2.112.571.495	2.112.571.495	428.899.831	547.869.524	976.769.355	46.24					
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	3	100			Administrasi keuangan yang dikelola adalah 1. Mengenai Pembukuan, 2. Pertanggungjawaban 3. Pengarsipan
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan TunjanganASN						2.075.911.495	2.075.911.495	2.075.911.495	428.899.831	539.724.524	968.624.355	46.66					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	19	19	19	19	19	18	17	17		89.47	17	89.47			ASN yang terbayar gajinya di TW 3 adalah 16 orang, terdapat 1 ASN yang pensiun di bulan September ASN yang terbayar gajinya di TW 4 adalah 15 orang, terdapat 1 ASN yang akan pensiun di bulan Desember
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN						36.660.000	36.660.000	36.660.000		8.145.000	8.145.000	22.22					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	5	4	5	5	5	4	4	4		80	4	80			Realisasi pengelola keuangan SKPD hanya 4 orang karena pejabat pengadaan barang dan jasa diajukan di RKPD Perubahan di TW IV realisasi pengelola keuangan SKPD berjumlah 5 orang
[KEGIATAN]X.XX.01.2.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah						252.492.100	252.492.100	252.492.100		28.713.321	28.713.321	11.37					
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	6	6	6	6	6	6	6		100	6	100			Administrasi Umum yang dikelola adalah 1, Agendaris (surat keluar dan surat masuk) 2.Kepegawaian, 3. Pencatatan Barang Milik Daerah, 4.Penyediaan Barang/ Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 5.Penyelenggaraan Rapat- RapatKoordinasi. 6.Penyediaan bahanrumah tangga dan logistik kantor
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.420.000	2.420.000	2.420.000		1.140.000	1.140.000	47.11					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	3		100	3	100			Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor tersedia untuk : 1 untuk Rumah Dinas, 2untuk bangunan kantor
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor						13.047.139	13.047.139	13.047.139		7.970.000	7.970.000	61.09					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	4	4	4	4		100	4	100			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia adalah : 1.Alat Tulis Kantor 2.

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Permasalahan	Keterangan
								1	2						
															Penyediaan Kertas dan Cover 3. Penyediaan Benda Pos 4.Penyediaan Bahan Komputer
<b>[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.03</b> Penyediaan Peralatan RumahTangga					5.896.085	5.896.085	5.896.085		5.210.000	5.210.000	88.36				
<b>[INDSUBKEGIATAN]</b>	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	1	1	1	1	1	1	1	1	100	1	100		Peralatan Rumah tangga yang tersedia adalah : Bahan dan alat kebersihan, Perabot Kantor dan Obat-obatan
<b>[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor					57.833.500	57.833.500	57.833.500		7.932.221	7.932.221	13.72				
<b>[INDSUBKEGIATAN]</b>	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	36	12	12	12	12	3	3	6	50	18	50		Logistik kantor yang tersedia di TW 2, 3 dan 4 : 1.Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas 2.Natura dan Pakan Natura ( dan lisi Ulang Gas) 3. Makanan dan Minuman Rapat
<b>[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.05</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					8.735.800	8.735.800	8.735.800		2.421.100	2.421.100	27.71				
<b>[INDSUBKEGIATAN]</b>	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	27	9	9	9	9	1	2	3	33.33	12	44.44		Cetakan yang tersedia di TW 3 adalah : 2 buah Banner yaitu Banner HUT RI dan Hari Anak Cetakan yang tersedia di TW 4 adalah : 5 buah Banner yaitu Hari Kesaktian Pancasila, Hari Santri Nasional, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan dan Hari KORPRI
<b>[INDSUBKEGIATAN]</b>	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	690000	23000	23000	23000	23000	7608	6635	14243	61.93	37243	5.4		Penggandaan yang tersedia diTW 2 adalah 6635 lembar ( penggandaan surat dan dokumen) Penggandaan yangtersedia di TW 3 adalah 7100 lembar ( penggandaan surat dan dokumen) Penggandaan yang tersedia di TW 4 adalah 4740 lembar ( penggandaan surat dan dokumen)
<b>[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.09</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					164.559.576	164.559.576	164.559.576		4.040.000	4.040.000	2.46				
<b>[INDSUBKEGIATAN]</b>	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	300	100	100	100	100	10	36	46	46	146	48.67		TW II: Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan yang dilaksanakan : 36 kali, dan tambahan TW 1 : 29 kali TW III:Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan yang dilaksanakan :31 kali TW IV: Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan yang dilaksanakan :51 kali
<b>[KEGIATAN]X.XX.01.2.07</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					53.544.000	53.544.000	53.544.000				0				

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Permasalahan	Keterangan
					1	2	3	4	5	6	1	2						
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	18	6	6	6	6	6	6	0	3	3	50	9	50			TW II: Barang Milik Daerah yang tersedia adalah : 2 buah laptop dan 1 buah dekstop PC TW III: Barang Milik Daerah yang tersedia adalah: Printer dan LCDTW IV : Barang Milik Daerah yang tersedia adalah : Meja dan Kursi staf
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						48.544.000		48.544.000		48.544.000			0					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	15	5	5		5		5	0	5	5	100	10	66.67			Pengadaan Peralatan dan Mesin sudah dilaksanakan di TW 2
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000		5.000.000		5.000.000			0					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	3	1	1		1		1	0	1	1	100	2	66.67			TW 2 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya TW 3 Tidak ada pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya TW 4 Tidak ada pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
[KEGIATAN]X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						272.671.900		272.671.900		272.671.900		39.170.384	61.961.471	101.131.855	37.09			
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	3	3		3		3	3	3	3	100	3	100			Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia : adalah pembayaran honor jasa tenaga administrasi, jasa tenaga keamanan, jasa tenaga pengemudi dan jasa tenaga kebersihan selama 3 ( tiga) bulan di Triwulan 2, 3 dan 4
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik						27.975.900		27.975.900		27.975.900			4.735.895	4.735.895	16.93			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	36	12	12		12		12	3	3	6	50	18	50			TW 2 Langganan sudah berjalan selama 6 bulan TW 3Langganan sudah berjalan selama 9 bulan TW 4 Langganan sudah berjalan selama 12 bulan
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.400.000		7.400.000		7.400.000			450.000	450.000	6.08			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantoryang dilaksanakan	Jenis	5	1	5		5		5	0	0	0	0		0			Sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan yaitu Sewa Soundsystem, Tenda, Kursi dan pakaian adat

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Permasalahan	Keterangan
								1	2						
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					237.296.000	237.296.000	237.296.000	39.170.384	56.775.576	95.945.960	40.43				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	10	10	10	10	10	10	10	10	100	10	100	Jumlah pegawai Non ASN adalah 10 Orang	Jumlah pegawai Non ASN adalah 10 Orang
[KEGIATAN]X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					250.590.000	250.590.000	250.590.000		152.682.500	152.682.500	60.93				
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	3	4	4	4	4	4	4	100	4	100	Jumlah Barang yang dipelihara : 1. Kendaraan Dinas 2. Peralatan dan Mesin Lainnya, 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan Lainnya	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					27.200.000	27.200.000	27.200.000		2.077.500	2.077.500	7.64				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	9	8	9	9	9	9	9	9	100	9	100	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara adalah 9 unit ( mobil 2 motor 7 )	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.090.000	9.090.000	9.090.000		505.000	505.000	5.56				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	30	30	30	30	30	30	30	30	100	30	100	Peralatan kantor dan mesin yang dipelihara adalah 30 unit yaitu : 1 unit LCD, 9 unit Sarana Kantor-Inventaris kantor, 8 Unit AC Split, 1 unit alat pemotong rumput, 1 unit pompa air, 1 unit TV, 4 unit komputer PC, 5 unit Printer	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					214.300.000	214.300.000	214.300.000		150.100.000	150.100.000	70.04				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	6	2	2	2	2	0	1	1	50	3	50	Gedung Pemkab yang dipelihara adalah pemeliharaan yang dilakukan perbaikan kerusakan-kerusakan kecil TW 4 : Pembuatan Tempat/bangunan Parkir ( dari Pokir )	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	Unit	3	0	1	1	1	0	0	0	0		0	tidak ada sarana dan prasarana yang di pelihara, dihapus pada anggaran perubahan	



Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Permasalahan	Keterangan
								1	2						
	bangunan lainnyayang dipelihara														
<b>[PROGRAM]PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						8.800.000	8.800.000	8.800.000		1.235.000	1.235.000	14.03			
<b>[INDPROGRAM]</b>	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		TW II Presentase 100% : 5.349 orang mengajukan permohonan dan semuanya sudah terlayani TW III Presentase 100%: 2.329 orangmengajukan permohonan dansemuanya sudah terlayani TWIV Presentase 100%: 2.216 orang mengajukan permohonan dan semuanya sudah terlayani
<b>[KEGIATAN]Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>						8.800.000	8.800.000	8.800.000		1.235.000	1.235.000	14.03			
<b>[INDKEGIATAN]</b>	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	2	2	2	2	2	2	2	2	100	2	100		Pelayanan di Kecamatan Cilongok mencakup : 1 Pelayanan Masyarakat Umum 2.Pelayanan Khusus ( Pelayanan kepada Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat dan Dinas/Nivou)
<b>[SUBKEGIATAN]Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan</b>						5.425.000	5.425.000	5.425.000				0			
<b>[INDSUBKEGIATAN]</b>	pemohon pelayananandi Kecamatan yang terlayani	Orang	25200	8400	8400	8400	8400	8400	1966	3236	5202	61.93	13602	53.98	TW II: Pemohon pelayanan yang terlayani adalah 3.236 orang ( tambahan TW 1 : 384 orang) TW III: Pemohon pelayanan yang terlayani adalah 2.329 orang yang terdiridari pengambilan (1) KK: 736 orang; (2) E-KTP: 1.173 orang; (3) KIA: 420 orang TW IV : Pemohonan pelayanan yang terlayani adalah 1.406 orang yang terdiri dari pengambilan (1) KK : 621 orang; (2). E.KTP : 1.242 orang; (3) : 353 orang
<b>[SUBKEGIATAN]Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>						3.375.000	3.375.000	3.375.000		1.235.000	1.235.000	36.59			
<b>[INDSUBKEGIATAN]</b>	Jumlah Desa/kelurahan yangtelah menyampaikanlaporan PBB yang terbayar	Desa	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	20	100	20 desa di Kecamatan Cilongok telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar
<b>[PROGRAM]PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						43.885.000	43.885.000	43.885.000		7.265.000	7.265.000	16.55			

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Permasalahan	Keterangan
					1	2	3	4	5	6								
[INDPROGRAM]	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Presentase 100% : seluruh desa ( 20 desa ) di Kecamatan Cilongok aktif dalam kegiatan pemberdayaan ( kegiatan PKK/kelompok perempuan, Karang Taruna, Kelompok Posyandu, kegiatan keagamaan, kegiatan seni dan budaya, pengelolaan PAUD )	
[KEGIATAN]Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						43.885.000	43.885.000	43.885.000			7.265.000	7.265.000	16.55					
[INDKEGIATAN]	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	20	100		Seluruh Desa di Kecamatan Cilongok aktif dalam pemberdayaan masyarakat ( Desa Panusupan, Jatisaba, Kasegeran, Pejogol, Langgongsari, Pageraji, Sudimara, Batuanten, Cipete, Cilongok, Pernasidi, Cikidang, Karanglo, Kalisari, Karangtengah, Panembangan, Rancamaya, Sambirata, Gununglurah, Sokawera. dan kegiatannya : PKK/Kelompok Perempuan, Karang Taruna, Kelompok Posyandu, Kelompok Keagamaan, Seni dan Budaya)	
[SUBKEGIATAN]Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						11.715.000	11.715.000	11.715.000			3.980.000	3.980.000	33.97					
[INDSUBKEGIATAN]	jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	1800	600	600	600	600	600	120	0	120	20	720	40			Musrenbang dilaksanakan di Triwulan 1, dan jumlah peserta tidak sesuai rencana karena dilaksanakan secara daring dandi tempat masing-masing Kegiatan di TW IV adalah mengevaluasi hasil dari kegiatan monitoring perencanaan dan pembangunan di desa (yang dilaksanakan oleh desa) dan penyampaian/mengingatkan kembali proses dalam musrenbang	
[SUBKEGIATAN]Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						4.675.000	4.675.000	4.675.000			1.750.000	1.750.000	37.43					
[INDSUBKEGIATAN]	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Kali	18	6	6	6	6	6	2	0	2	33.33	8	44.44			di TW 2 tidak ada Rapat terkait pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di TW 3 terlaksana 2 rapat: (1) Sosialisasi budaya kerja ASN, (2) Rapat koordinasi usulan pedirian SMA	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Permasalahan	Keterangan
								1	2						
															Negeri di Cilongok di TW 4 terlaksana 2 kegiatan : (1) Koordinasi Pencairan Bantuan, (2) Koordinasi Bulan Dana PMI
[SUBKEGIATAN]Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan						27.495.000	27.495.000	27.495.000		1.535.000	1.535.000	5.58			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Keg	36	12	12	12	12		3	3	6	50	18	50	Kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah : 1.RapatPengurus TP PKK Kecamatan 2. Sosialisasi Hasil Rakernas 9 PKKBagi Pengurus TP PKK Desa se Kecamatan 3.Rapat Orientasi Bendahara dan Sekretaris TP PKK Desa se Kecamatan Kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah : 1. Kegiatan Pokja-Pokja PKK, 2. Rapat Koordinasi TP PKK Tingkat Kecamatan, 3. Rapat evaluasi Laporan TP PKK Desa
[PROGRAM]PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM						13.440.000	13.440.000	13.440.000							
[INDPROGRAM]	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TW II Presentase 100 %: terdapat 1 kegiatan yang sudahterlaksana dari 1 rencana kegiatan yang ada ( kegiatannya adalah harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat) TW III Presentase 100%: kegiatan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa TW IV Presentase 100%: kegiatan penanganan bencana alam tanah longsor di desa Jatisaba, Batuanten, Panusupan dan Kasegeran
[KEGIATAN]Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum						7.655.000	7.655.000	7.655.000				0			
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	12	4	4	4	4		0	2	2	50	6	50	TW II: Kegiatan Koordinasi yang dilakukan di TW 2 ada 2 kegiatan namun dilaksanakan menjadi satu kegiatan untuk efisiensi waktu kegiatannya adalah harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat TW III: Kegiatan korrdinasi yang dilakukan adalah Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Permasalahan	Keterangan
					1	2	1	2							
															Masyarakat tingkat Kecamatan Desa TW IV : Kegiatan penanganan bencana tanah longsor di desa Panusupan, Jatisaba, Kasegeran dan Batuanten
[SUBKEGIATAN]Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.385.000	2.385.000	2.385.000				0			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan		5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	5	100	Unsur yang bersinergi : TNI, POLRI, Pemerintah, Tomas/Toga, Masyarakat
[SUBKEGIATAN]Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						5.270.000	5.270.000	5.270.000				0			
[INDSUBKEGIATAN]	Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Kali	6	2	2	2	2	2	0	2	2	100	4	66.67	Sudah dilaksanakan padatriwulan 2
[KEGIATAN]Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						5.785.000	5.785.000	5.785.000				0			
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keg	6	2	2	2	2	2	0	0	0	0	2	33.33	Kegiatan belum terlaksana karena banyak kegiatan penangan bencana di wilayah (beberapa desa mengalami bencana : rumah terbakar, tanah longsor)
[SUBKEGIATAN]Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						5.785.000	5.785.000	5.785.000				0			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	Keg	6	2	1	1	1	1	0	0	0	0	2	33.33	Kegiatan belum terlaksana karena lebih prioritas untuk kegiatan bencana longsor yang

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Permasalahan	Keterangan
								1	2						
														sering terjadi di TW 3	
<b>[PROGRAM]PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>						12.920.000	12.920.000	12.920.000							
<b>[INDPROGRAM]</b>	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Presentase 100% : seluruh desadi Kecamatan Cilongok (20 Desa) sudah mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kegiatan mentoring dan Evaluasi pelaksanaan APBDes ke setiap desa. dan Pemaparan RAPBDes tahun 2023
<b>[KEGIATAN]Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>						12.920.000	12.920.000	12.920.000			0				
<b>[INDKEGIATAN]</b>	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	20	20	20	20	20	20	20	20	100	20	100		Seluruh desa di kecamatan Cilongok sudah mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes, ( Monev dan pembinaan administrasi Pemerintah Desa)
<b>[SUBKEGIATAN]Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>						12.920.000	12.920.000	12.920.000			0				
<b>[INDSUBKEGIATAN]</b>	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kali	150	50	50	50	50	12	13	25	50	75	50		TW II: Pembinaan dan pengawasan APBDes yang dilakukan : al. 1. BinteK pengadaan barang dan jasa bagi Sekdes, bendahara desa, kasi kesra dan kaur perencanaan, 2. Fasilitasi Musyawarah Desa Langgongsari, 3. Pembinaan LPMD Desa Kalisari, 4. Fasilitasi Monev dari Inspektorat ke desa, 5. Fasilitasi Monev Aset Desa, 6. Musyawarah tentang sewa tanah kas desa, 7. Fasilitasi temu Kepala Desa Jawa Tengah secara daring dengan Gubernur Jateng 8. Fasilitasi permohonan pengunduran diri BPD, 9. Fasilitasi pengisian anggota BPD antar waktu, 10. Fasilitasi rekomendasi pencairan Dana- dana Desa, 11. Fasilitasi Pembuatan surat Keputusan Kepala Desa 12. Fasilitasi Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa 13. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPD dan APBDes TW III: Pembinaan dan pengawasan APBDes yang

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.733.639.960,00 dengan 5 program dan 11 kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut pada semester pertama sudah terealisasi sebesar Rp 1.314.566.358,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 41,88 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 41,88 % Dengan penyerapan anggaran terendah dan tertinggi yaitu pada kegiatan:

1. Penyerapan terendah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dengan penyerapan anggaran 0 %;
2. Penyerapan tertinggi pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan penyerapan anggaran 69,19 %.

Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, Sisa anggaran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp. 1.419.073.602,00

## **2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah :

- a. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan,
- b. Masih belum optimalnya serapan anggaran

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Kecamatan Cilongok mempunyai tugas peran strategis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

## 1. Tugas Pokok

Kecamatan Cilongok mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan Cilongok mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, e.koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati,
- e. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum,
- f. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan,
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan,
- i. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Cilongok adalah informasi dan pelayanan masyarakat yang meliputi:

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan Desa;

Strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cilongok yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada;



## **BAB III**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022  
KECAMATAN CILONGOK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah				
7		UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01	KECAMATAN														2,733,639,960	2,845,526,701			2,998,332,000		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														2,656,684,960	2,776,481,701			2,925,551,000	
7	01	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														2,695,000	2,669,000			3,034,000
7	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Jumlah dokumen perencanaan yang dissusun	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	1,335,000	1,309,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	1,517,000	
7	01	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	4 keg	4 keg	100 %	100 %	1,360,000	1,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	1,517,000	
7	01	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														1,947,827,960	2,064,514,701			2,404,063,000
7	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	19 orang	19 orang	100 %	100 %	1,915,967,960	2,027,854,701	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	2,374,008,000	
7	01	01	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Honor pengelola Keuangan Perangkat Daerah yang dibayarkan	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	31,860,000	36,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	30,055,000	
01	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah														141,233,780	184,692,100			105,772,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Jumlah komponen listrik / penerangan bangunan yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	2,420,000	2,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	1,831,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	25 jenis	25 jenis	100 %	100 %	14,695,395	13,047,139	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	16,165,000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	20 jenis	20 jenis	100 %	100 %	6,256,085	5,896,085	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	5,058,000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	32,136,000	47,203,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	14,811,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Jumlah cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	6 buah 24000 lembar	6 buah 24000 lembar	100 %	100 %	8,285,800	8,285,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	8,804,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Jumlah koordinasi / konsultasi dan pertemuan tingkat provinsi /pusat yang dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	250 kali	250 kali	100 %	100 %	77,440,500	107,839,576	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	59,103,000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											53,544,000	53,544,000		100,838,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Cilongok	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	10 jenis	10 jenis	100 %	100 %	48,544,000	48,544,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Cilongok	100 %	90,719,000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Cilongok	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Cilongok	100 %	10,119,000	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>282,319,220</b>	<b>271,171,900</b>		<b>211,357,000</b>			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	33,623,220	27,975,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	55,293,000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	7,400,000	5,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	9,553,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honoranya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	241,296,000	237,296,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Cilongok	100 %	146,511,000	
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>229,065,000</b>	<b>199,890,000</b>		<b>100,487,000</b>			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Cilongok	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	9 unit	9 unit	100 %	100 %	32,450,000	26,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Cilongok	100 %	59,909,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Cilongok	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	30 unit	30 unit	100 %	100 %	14,565,000	9,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Cilongok	100 %	15,027,000	
7 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Cilongok	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	3 unit	3 unit	100 %	100 %	174,550,000	164,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Cilongok	100 %	15,179,000	
7 01 01 2.0 9 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Cilongok	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	7,500,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Cilongok	100 %	10,372,000	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											9,925,000	8,800,000			15,785,000		
7 01 02 2.0 4	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>											9,925,000	8,800,000			15,785,000		
7 01 02 2.0 4 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	1000 orang	1000 orang	100 %	100 %	6,550,000	5,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	9,967,000	
7 01 02 2.0 4 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	20 desa	20 desa	100 %	100 %	3,375,000	3,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	5,818,000	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>											37,845,000	33,885,000			31,217,000		
7 01 03 2.0 1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>											37,845,000	33,885,000			31,217,000		
7 01 03 2.0 1 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Cilongok	jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	180 orang	180 orang	100 %	100 %	14,015,000	11,715,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Cilongok	100 %	13,762,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7 01 03 2.0 1 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Cilongok	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	6 kali	6 kali	100 %	100 %	6,335,000	4,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Cilongok	100 %	5,312,000	
7 01 03 2.0 1 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Cilongok	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	12 kegiatan	12 kegiatan	100 %	100 %	17,495,000	17,495,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Cilongok	100 %	12,143,000	
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>											16,265,000	13,440,000		14,167,000			
7 01 04 2.0 1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>											7,905,000	7,655,000		6,628,000			
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di WilayahKecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	4 unsur	4 unsur	100 %	100 %	2,385,000	2,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	3,213,000	
7 01 04 2.0 1 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	2 kali	2 kali	100 %	100 %	5,520,000	5,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	3,415,000	
7 01 04 2.0 2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>											8,360,000	5,785,000		7,539,000			
7 01 04 2.0 2 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Cilongok	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	2 keg	2 keg	100 %	100 %	8,360,000	5,785,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Cilongok	100 %	7,539,000	
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>											12,920,000	12,920,000		11,612,000			
7 01 06 2.0 1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>											12,920,000	12,920,000		11,612,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7 01 06 2.0 1 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Kab. Banyumas, Cilongok, Pernasidi	100 %	100 %	4 kali	4 kali	100 %	100 %	12,920,000	12,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %	11,612,000	
<b>TOTAL</b>												<b>2,733,639,960</b>	<b>2,845,526,701</b>			<b>2,998,332,000</b>		

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Cilongok Tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Cilongok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2022, beberapa kaedah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cilongok Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Kecamatan Cilongok dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilongok Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

  
KAMAT CILONGOK  
RONI Hidayat, S.SIP., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19760908 199602 1 003